PARADIGMA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PENGERTIAN PARADIGMA

Paradigma adalah standar suatu disiplin ilmu dilihat dari focus dan locusnya. Focus mempersoalkan apa kajian (what of the field) atau cara bagaimana memecahkan (solution) sebuah masalah. Sedangkan locus mempersoalkan dimana lokasi (where of the field) atau medan penerapan suatu ilmu pengetahuan.

Robert T. Golembiewski dalam Inu Kencana Syafiie (1999: 28)

PARADIGMA ADMINISTRASI LAMA

Dalam perkembangan ilmu Administrasi Negara lama telah terjadi empat kali perubahan paradigma. Berikut gagasan utama dari keempat paradigma tersebut:

- 1. Dikotomi Politik dan Administrasi
- 2. Prinsip-Prinsip Administrasi
- 3. Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik
- 4. Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi
- Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi Negara

A. PARADIGMA I DIKTONOMI ANTARA POLITIK DAN ADIMISTRASI

Nicholas Henry, 1980, Dwight Waldo, 1968, Frank J. Goodnow (1900), Leonard D. White.

Membagi ruang lingkup antara administrasi dan politik.

Scope Administrasi

- Organisasi
- Kepegawaian
- Penyusunan
 Anggaran dalam
 birokrasi

Scope Politik

- Pemerintah
- Politik
- Kebijaksanaan

PARADIGMA ADM. PUBLIK LAMA

- Administrasi Publik Juga di kenal dengan nama lain yaitu Klasik atau tradisional.
- Ide Pokok dalam paradigma Adminisrasi Publik Lama Berfokus pada.
- ✓ Diktonomi politik Administrasi
- ✓ Prinsip-prinsip manajement

Tokoh:

- ✓ Woodrow Wilson "The Study of Administration" (1887).
- √F.W. Taylor "Principles of Scientific Management"

Ada 2 pokok pikiran Wilson yang menjadi focus studi adm. publik saat itu:

- Pembedaan antara politik dan administrasi (Dikotomi Politik – Administrasi)
- Perlunya pengembangan struktur dan strategi manajemen administrasi yang dapat membuat organisasi publik dan manajernya bertindak dengan cara seefisien mungkin.

IDE-IDE POKOK ADMINISTRASI PUBLIK LAMA

- Administrasi publik tdk banyak berperan dalam perumusan kebijakan publik; adm. publik lebih berkenaan dgn fungsi implementasi kebijakan > organisasi dan manajemen > Neutral expertise
- Program publik dilaksanakan melalui organisasi hirarkis- birokratis
- Nilai utama: nilai/rasionalitas ekonomi (efisiensi dan efektivitas).

PARADIGMA II PRINSIP-PRINSIP ADMINISTRASI (1927-1937)

Berfokus pada prinsip-prinsip Administrasi Universal.

P Planning

O Organizing

S Staffing

D Directing

Cor
 Cordinating

R Reporting

B Budgeting

Tokoh: Luther H. Gullick dan Lyndall Urwick

PRINSIP-PRINSIP ADMINISTRASI

Efisiensi dan efektivitas terwujud melalui organisasi yg berstruktur **hirarkis** >> Birokrasi :

- unity of command
- hierarchical authority
- strict division of labour

The work of the executive was POSDCORB

PARADIGMA III ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI ILMU POLITIK (1950 – 1970)

Lokus

Adalah tempat yang menggambarkan di mana ilmu tersebut berada. Dalam hal ini lokus dari ilmu administrasi publik adalah: kepentingan publik (public interest) dan urusan publik (public affair).

Focus

Fokus adalah apa yang menjadi pembahasan penting dalam memepelajari ilmu administrasi publik. yang menjadi fokus dari ilmu administrasi publik adalah teori organisasi dan ilmu manajemen.

Tokoh: Woodrow Wilson

 Woodrow Wilson dalam bukunya: "Introduction To Study Administration" (1887)

Wilson berargumen "It's getting harder to run a constitution than to frameone". Keinginan Wilson adalah memfokuskan tidak hanya masalah personal tapi juga masalah organisasional dan manajemen secara umum.

ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI ILMU ADMINISTRASI

Pada fase ini ilmu administrasi hanya memberikan fokus, tetapi tidak pada lokusnya.

Sebagai suatu focus, pengembangan organisasi menawarkan alternatif ilmu politik yang menarik bagi banyak ahli administrasi negara. Pengembangan organsiasi sebagai sebuah bidang ilmu, berakar pada psikologi sosial dan nilai domokratisasi birokrasi baik negara maupun swasta dan swa-aktualisasi para anggota perorangan dari organisasi.

PARADIGMA V ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Lokus

Birokrasi pemerintahan & public affair

Fokus

Teori organisasi, praktek-praktek dalam analisis public policy dan teknik-teknik administrasi dan manajemen

TABEL RINGKASAN PARADIGMA LAMA

Nicholas Henry

No	Paradigma	Lokus	Fokus	Keterangan
1.	Dikotomi antara Politik dan Administrasi	Birokrasi Pemerintahan	Administrasi secara umum (teori organisasi, kepegawaian, penyusunan anggaran, dll)	Administrasi dan politik dua hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan
2.	Prinsip-prinsip Administrasi	Tidak dipermasalahkan, berlaku universal	Bagaimana menjalankan prinsi- prinsip administrasi negara	Dipengaruhi oleh ilmu manajemen yaitu POSDCORB
3.	Administrasi sebagai ilmu politik	Birokrasi pemerintahan	Politik birokrasi	Politik tidak mengakui
4.	Administrasi publik sebagai ilmu administrasi	Berlaku universal	Administrasi secara umum	Alternatif dari sebelumnya
5.	Administrasi publik sebagai administrasi publik	Birokrasi pemerintahan & public affair	Teori organisasi, praktek-praktek dalam analisis public policy dan teknik- teknik administrasi dan manajemen	Paradigma yang berlaku sampai saat ini

PARADIGMA NEW PUBLIC ADMINISTRATION

- Perkembangannya mulai awal tahun 1970
- Tokoh: Frank Marini, George Frederickson "Toward A New Public Administration; The Minnowbrook Perspective":
- Kinerja adm publik tidak hanya dinilai dr pencapaian nilai ekonomi ,efisiensi, dan efektivitas ,tapi juga pada nilai "social equity" (disebut sbg pilar ketiga setelah nilai efisiensi dan efektivitas)

RINGKASAN PERBEDAAN

	Administrasi Publik Lama	Administrasi Publik Baru
Orientasi Tujuan	Orientasi Internal - Mengutamakan kepengtingan Organisasi - Manusia sebagai makhluk mekanistik	Orientasi Eksternal - Mengutamakan tujuan individu dan sosial - Manusia sebagai makhluk Humanistik
Nilai	Rasionalitas Ekonomis - Efisiensi - Ekonomi - Evektifitas	Humanism - Relevansi - Kesetaraan sosial - Orientasi pada kllien
Struktur Organisasi	Birokratis - Hirarkis	Non-Birokratis - Partisipatif
Proses	Manajement Internasional	DistributifIntegratifBoundary-ExchangeSocio-emotional

PARADIGMA NEW PUBLIC MANAGEMENT (NPM)

Orientasi NPM menurut Ferlie, Ashbuerner, Filzgerald dan Pettgrew dala Keban (2004:25) yaitu :

 Orientasi The Drive yaitu mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran kinerja.

 Orientasi Downsizing and Decentralization yaitu mengutamakan penyederhanaan struktur, memperkaya fungsi, dan mendelegasikan otoritas kepada unit-unit yang lebih kecil agar dapat berfungsi secara cepat dan tepat.

 Orientasi In Search of Exellence yaitu mngutamakan kinerja optimal dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Orientasi Public Service yaitu menekankan pada kualitas, misi, dan nilai-nilai yang hendak dicapai organisasi publik, memberikan perhatian yang lebih besar kepada aspirasi, memberikan otoritas yang lebih tinggi kepada pejabat yang dipilih oleh masyarakat, termasuk wakl-wakil mereka, menekankan social learning dalam pemberian pelayanan publik dan penekanan pada evaluasi kinerja secara berkesinambungan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas.

NEW PUBLIC MANAGEMENT

Menurut G. Allison dalam Public and Private Management, 1982. Fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut :

- 1. Etablishing objective and priorities

 menyusun tujuan utama
- 2. Devising operational plans → dipilah dlm. rencana operasional
- 3. Organizing and Staffing → pengorganisasian dan penetapan staf
- 4. Directing personal and the personal management system → kepemimpinan untuk mengarahkan seluruh komponen yang ada
- 5. Controlling performance -> mengawasi/mengenalikan kinerja
- Dealing with internal units → berhubungan dgn. unit dlm.
 Organisasi
- Dealing with independent organization → berhubungan dgn.
 Organisasi independent
- Dealing with the press and the public → berhubungan dgn. Media massa dan masyarakat.

NEW PUBLIC SERVICE

Konsep Dasar

- Paradigma NPS merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Janet V. Dernhart dan Robert B. Dernhart (2003) berjudul "The New Public Service: Serving, not Steering".
 - Paradigma NPS untuk meng-counter paradigma NPM yang berprinsip "run government like a business" atau "market as solution to the ills in public sector"





Konsep Dasar

 Gagasan Denhardt & Denhardt tentang pelayanan publik baru (NPS), menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak dijalankan seperti layaknya sebuah perusahaan tetapi melayani masyarakat secara demokratis, adil, merata tidak diskriminatif, jujur dan akuntabel.



PARADIGMA NPS

- Nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan dan kepentingan publik adalah merupakan landasan utama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan
- Nilai-nilai tersebut memberi energi kepada pegawai pemerintah atau pelayan publik dalam memberikan pelayanannya kepada publik secara lebih adil, merata, jujur, dan bertanggung jawab.



PARADIGMA NPS

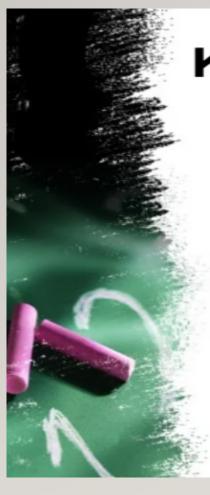
Pemerintah perlu mengubah pendekatan kepada masyarakat :

- Dari suka memberi perintah dan mengajari masyarakat menjadi mau mendengarkan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat,
- Dari suka mengarahkan dan memaksa masyarakat menjadi mau merespon dan melayani apa yang menjadi kepentingan dan harapan masyarakat.



- Birokrasi tidak bisa dinilai baik atau buruk hanya semata-mata karena organisasi mereka yang besar, anggaran yang banyak, atau struktur yang kompleks, karena hal itu boleh saja terjadi sepanjang rakyat menginginkannya.
- Baik buruknya birokrasi bukanlah pada persoalan apakah memenuhi standar nilai-nilai pasar atau tidak, melainkan pada persoalan apakah bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyat.

Denhardt & Denhardt (2000): Corak manajemen dan lingkungan kerja birokrasi tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam market mechanism sehingga memaksakan prinsip-prinsip manajemen swasta ke dalam institusi birokrasi justru dapat berakibat kontra produktif terhadap kinerja birokrasi itu sendiri.



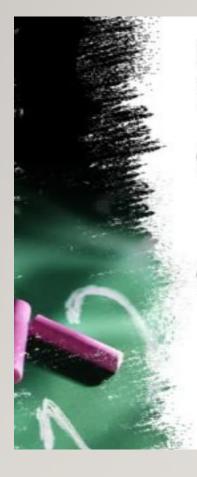
- Birokrasi tidak bisa dinilai baik atau buruk hanya semata-mata karena organisasi mereka yang besar, anggaran yang banyak, atau struktur yang kompleks, karena hal itu boleh saja terjadi sepanjang rakyat menginginkannya.
- Baik buruknya birokrasi bukanlah pada persoalan apakah memenuhi standar nilai-nilai pasar atau tidak, melainkan pada persoalan apakah bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyat.

- Konsep NPS yang diajukan oleh Denhardt dan Denhardt dengan nilai-nilai neoliberalisme NPM tidak hilang secara otomatis.
- Ketika pemerintah melayani masyarakat sebagai warga negara misalnya aspek privatisasi bisa saja tetap berlangsung asalkan atas nama melayani kepentingan warga negara bukan pelanggan.



 Ada sepuluh dimensi untuk mengukur keberhasilan dalam penerapan konsep standar dan kualitas pelayanan publik;

(1)tangable; yang menekankan pada penyediaan fasilitas fisik, peralatan, personil, dan komunikasi,



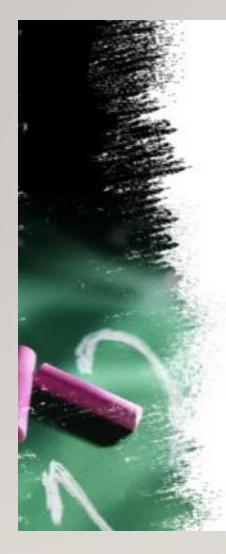
- (2) Reability adalah kemampuan unit pelayanan untuk menciptakan yang dijanjikan dengan tepat,
- (3) Responsiveness; kemauan untuk membantu para provider untuk bertanggungjawab terhadap mutu layanan yang diberikan.



- (4) Competence; kemampuan yang dimiliki berupa pengetahuan dan keterampilan yang baik bagi aparatur dalam memberikan layanan.
- (5) Courtessy; sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan pelanggan serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi.



- (6) Credibility; sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat.
- (7) Security; jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin dan bebas dari bahaya dan resiko.
- (8) Acces; terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan.



- (9) Communication; kemauan pemberi layanan untuk mendengarkan suara keinginan, atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat.
- (10) Understanding the customer; melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan.

